

PULAU GALANG: SAKSI BISU PERAN KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP KORBAN PERANG VIETNAM, 1976-1997

Petra Wahyu Utama, M.Hum
Universitas Khairun
petrawahyu.utama@unkhair.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran Indonesia di bidang kemanusiaan terkait dengan penanganan pengungsi Vietnam yang menjadi korban dari terjadinya perang saudara. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara. Hal itu mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya, manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Pulau Galang menjadi saksi bagaimana pemerintah Indonesia menangani orang-orang Vietnam yang datang mengungsi dalam keadaan sakit, frustrasi, dan ketakutan. Mereka tinggal di pulau ini mulai dari 1976 dan berhasil dikembalikan oleh pemerintah Indonesia pada 1997.

Abstract

This article discusses Indonesia's role in the humanitarian sector related to the handling of Vietnamese refugees who were victims of the civil war. Humanity describes human tenderness, compassion and compassion towards others, the environment, animals despite suffering and suffering. It includes all natures, views, ways of thinking and actions that by nature, humans must have, because humanity is an inner impulse to give birth to an attitude or action of humanity. Galang Island witnessed how the Indonesian government handled Vietnamese refugees who came sick, frustrated, and scared. They lived on the island starting from 1976 and were successfully returned by the Indonesian government in 1997.

Pendahuluan

Pulau Galang secara administratif terletak di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini termasuk Galang, merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra-tercier yang membentang dari semenanjung Malaysia/Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Pulau Galang yang saat ini menjadi salah satu Kecamatan di Batam yang kental dengan kisah historis yang melekat di dalamnya. Galang sempat menjadi tempat eksodus bagi para pengungsi Vietnam yang dilanda konflik hingga akhir dekade 1970-an. Pada saat itu, Vietnam mengalami perang saudara yang terjadi antara pendukung Republik Demokratik Vietnam di Vietnam bagian utara dan juga Republik Vietnam di Vietnam bagian selatan (Hasibuan, 2007, p. 8).

Kondisi sulit itu mengakibatkan penduduk Vietnam mengungsi ke daerah yang lebih aman. Mereka mengungsi menggunakan perahu dan mengarungi Laut Cina Selatan. Pada 22 Mei 1975 satu kapal bermuatan 75 orang tiba di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia. Setibanya disana mereka pun membuat tempat persinggahan sementara yang dibantu oleh sebagian penduduk lokal. Eksodus orang-orang Vietnam semakin meningkat seiring perang yang terus berkecamuk. Para pengungsi itu ditolak oleh banyak negara karena membawa berbagai macam penyakit. Namun, atas dasar kemanusiaan dan kesepakatan yang dibuat antara Presiden Soeharto dengan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) pada 1976, maka Indonesia menerima pengungsi dari Vietnam itu dengan memperketat pengamanan dan menempatkannya di Pulau Galang (Tim Penyusun, 2002, p. 11-12).

Pada 1979 kamp dibangun dan fasilitas untuk pengungsi di salah satu desa bernama Sijantung. Dari 1979-1997 puluhan ribu orang tinggal di pengungsian yang memiliki luas 80 hektar ini. Akhir dari kisah Kamp Vietnam di Pulau Galang dimulai sejak 1994 ketika Pulau Galang dikosongkan oleh pemerintah untuk kebutuhan industri khusus. Pemerintah kemudian memulangkan setidaknya 8.500 orang pengungsi ke negara asalnya secara bertahap hingga tahun 1997 (*Tempo*, 1 April 2005).

Metode Penelitian

Studi penelitian terhadap Pulau Galang sebagai saksi bisu peran kemanusiaan Indonesia menggunakan metode penelitian sejarah. Target dari penelitian sejarah adalah untuk membuka wawasan sejarah dalam bentuk tertulis, sebagai hasil dari proses rekonstruksi berdasarkan sumber sejarah dengan prosedur untuk pencapaian kebenaran sejarah. Oleh karena itulah, diperlukan metode dalam penulisan sejarah. Metode penulisan sejarah bertumpu pada empat kegiatan pokok yaitu heuristik, kritik, interpersasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986, p.32). Sumber utama yang digunakan ialah arsip, data-data statistik sezaman, maupun wawancara, dan sumber yang diperoleh dari surat kabar. Adapun sumber sekunder yang digunakan untuk menghasilkan gambaran utuh berdasarkan periode yang dipilih dengan menggunakan berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan Pulau Galang dan peran kemanusiaan Indonesia pada kurun waktu 1976-1997.

Perang Saudara di Vietnam 1975

Perang yang terjadi di Vietnam terbagi menjadi dua bagian yakni Perang Vietnam I dan Perang Vietnam II. Perang Vietnam I terjadi pada akhir 1950-an. Kala itu Ho Chi Minh yang berhaluan komunis memimpin rakyat Vietnam melawan dominasi Barat dan melepaskan diri dari kolonialisme Prancis. Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet memberikan bantuan kepada Vietnam. Atas

bantuan dari dua raksasa komunis tersebut, Vietnam meningkatkan serangan mereka terhadap pos-pos Prancis di Vietnam. Adanya campur tangan Tiongkok dan Soviet memaksa Amerika juga turut terlibat dan melakukan penetrasinya di wilayah Vietnam. Vietnam bagian selatan yang merupakan basis anti komunis kemudian mendapatkan bantuan dari Amerika untuk melakukan perlawanan terhadap milisi-milisi komunis (Pradana, <https://www.idntimes.com/science/discovery/shandy-pradana/perang-vietnam>).

Perang Vietnam II pun kemudian meletus mulai akhir 1960-an dan puncaknya terjadi pada 1975. Perang Vietnam II yang berkecamuk kemudian melibatkan campur tangan dari dua blok negara super power kala itu. Uni Soviet dan Amerika yang terlibat perang dingin sama-sama ingin menancapkan ideologi yang mereka anut masing-masing termasuk di wilayah Vietnam. Amerika Serikat pun menjadikan Vietnam Selatan sebagai basis terdepan antikomunis di Asia Tenggara dengan mendirikan pakta pertahanan Asia Tenggara. Amerika Serikat kala itu sangat percaya pada teori domino yaitu apabila Vietnam Utara sampai menguasai Vietnam Selatan maka satu per satu wilayah sekitarnya akan jatuh ke tangan komunis. Akan tetapi, keberadaan Amerika di Vietnam justru menambah semangat barisan pasukan *Viet Cong* untuk melakukan perlawanan (M.C Namara dan Robert S, 1989, p. 23-26).



Gambar 1. Kondisi Anak-Anak dan Wanita Saat Perang Vietnam

Sumber: *Briscoe Center For American History*

Saat perang berlangsung ratusan warga sipil Vietnam tidak bersenjata seperti perempuan dan anak-anak banyak yang menjadi korban. Pembantaian terhadap warga sipil tidak bersenjata menjadi lambang kejahatan perang Amerika di Vietnam. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tentara Amerika Serikat itu dikenal dengan peristiwa *Song My* atau *My Lai* (Prasetyo, elsam.or.id). Akibatnya banyak warga kemudian meninggalkan negaranya, khususnya bagi warga Vietnam Selatan. Tujuan para pengungsi Vietnam tidaklah jelas negara mana yang akan mereka ingin datang namun, bagi mereka lebih baik mencari negara singgahan lain daripada menetap di nagara mereka sendiri yang tidak bisa memberikan mereka jaminan hidup aman dan sejahtera.

Kondisi negara Vietnam menjadi tidak stabil karena perang saudara yang tak kunjung usai. Hal itu menyebabkan gelombang para pengungsi semakin besar dan menyebar ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Hongkong, Filipina, dan Indonesia. Mereka tidak serta merta diterima, banyak diantaranya ditolak. Penolakan itu terjadi karena munculnya kekhawatiran bahwa para pengungsi yang datang membawa wabah atau penyakit dari negara asalnya. Tidak heran bila ribuan pengungsi pada akhirnya meninggal saat perjalanan pengungsiannya atau kelaparan karena terombang-ambing di lautan lepas akibat penolakan yang diterimanya.

Eksodus Manusia Perahu ke Indonesia

Berakhirnya perang Vietnam ke II pada 1975, ditandai dengan jatuhnya Saigon (kini Ho Chi Minh City) ke tangan komunis pada tanggal 30 April 1975. Namun demikian, meletus peperangan baru karena aneksasi Kamboja yang dilakukan oleh Vietnam tahun 1978 guna menghancurkan pemerintahan Khmer Merah. Perang itu dikenal dengan perang Sino-Vietnam. Pemerintahan Khmer Merah ternyata mendapat dukungan dari Tiongkok. Konflik baru pun terjadi dan semakin menambah pelik keadaan ketika militer Vietnam-Kamboja kemudian terlibat perang terbuka (Lind, 2013, p. 26).

Kondisi peperangan di Vietnam membuat banyak warga negaranya melakukan pengungsian ke wilayah-wilayah negara anggota ASEAN. Namun demikian, negara Vietnam sendiri tidak menunjukkan sikap serius dalam menangani masalah warganya yang mengungsi ke wilayah negara tetangganya itu. Sebagian para pengungsi Vietnam yang pergi dari negaranya lewat jalur laut kemudian mendapat julukan sebagai “Manusia Perahu”. Julukan itu disematkan karena mereka menempuh perjalanan keluar dari negerinya menggunakan perahu-perahu kecil yang disesaki oleh puluhan nyawa manusia.

Perjalanan mereka tidaklah mudah, demi mendapatkan perlindungan para pengungsi mempertaruhkan nyawanya. Bahkan, sebagian dari mereka tewas di perjalanan karena kelaparan, menjadi mangsa lautan atau para perompak yang berkeliaran di tengah-tengah lautan (Asmardika, <https://news.okezone.com/read/2016/05/13/18/1387149>). Mereka yang selamat kemudian mulai memasuki pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia seperti Kepulauan Riau diantaranya Pulau Laut, Pulau Kukup, Kepulauan Anambas, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kedatangan para manusia perahu pertama kali tercatat pada 25 Mei 1975. Mereka berhasil bersandar di Pulau Laut, Natuna dengan jumlah 75 orang.

Para pengungsi pada umumnya tiba dalam keadaan sakit, frustrasi, dan ketakutan. Gelombang kedatangan pengungsi itu kemudian membuat pemerintah menanggapi permasalahan ini dengan

serius. Dalam konferensi ASEAN tahun 1979 di Bali, Mochtar Kusumaatmadja selaku Menteri Luar Negeri yang mewakili Presiden Soeharto menyatakan komitmen untuk turut serta membantu problem kemanusiaan ini dengan menyiapkan sebuah lokasi yang dapat menampung setidaknya 10.000 orang (Robinson, 1998, p. 55).

Tabel 1. Gelombang Kedatangan Pengungsi Vietnam, 1981-1983

Rincian Tentang Pengungsi	Tahun 1981	Tahun 1982	Tahun 1983
Jumlah Kedatangan	15.095 Orang	5.913Orang	3.171 Orang
Meninggal dunia akibat serangan	571 Orang	155 Orang	43 Orang
Korban akibat diculik	243 Orang	157 Orang	89 Orang
Korban akibat diperkosa	599 Orang	179 Orang	85 Orang
Korban Hilang	Tidak diketahui	443 Orang	153 Orang
Kapal yang diserang	352 (77%)	141 (65%)	77 (56%)

Sumber: Data UNHCR November 1983 dalam Histma, 2012, hlm. 5

*Data yang dikeluarkan UNHCR tersebut belum termasuk korban meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit

Dari rincian data tersebut dapat diketahui bagaimana mengerikannya dampak perang yang dialami oleh para manusia perahu itu. Gelombang pengungsi semakin membesar dari kurun waktu 1975 sampai pertengahan 1980-an. Alih-alih untuk merubah harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih aman, justru nasib naas didapatkan selama mereka dalam perjalanan (Bunari, 2017, p. 37). Indonesia sebagai negara yang menjadi tujuan bagi para pengungsi kemudian menunjukkan peran untuk membantu mereka dengan membangun sebuah kamp di Pulau Galang, Batam.

Peran Kemanusiaan Indonesia untuk Vietnam

Turut sertanya Indonesia dalam penanganan pengungsi Vietnam sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia tersebut selaras dengan peran politik yang dianut yaitu bebas aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif memiliki pengertian bahwa peran Indonesia dalam percaturan dunia Internasional tidak bersifat reaktif, dan Indonesia tidak menjadi objek percaturan dunia internasional. Indonesia pun kemudian mulai aktif berperan di Asia Tenggara sejak ASEAN terbentuk pada tahun 1967 (Haryanto, 2014, p. 18).

Tindak lanjut tentang masalah pengungsi Vietnam tersebut kemudian tercermin pada terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Pengungsi Vietnam di Indonesia pada 11 September 1979 (Ismayawati, 2013, p. 2-5). Pemerintah bersama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) kemudian aktif dalam penanganan masalah pengungsi Vietnam. Tahun demi tahun, jumlah pengungsi semakin bertambah. Menghadapi peningkatan arus pengungsi Vietnam tersebut, ditambah dengan adanya kebutuhan berdasarkan prinsip kemanusiaan untuk menyediakan penampungan yang manusiawi, maka pemerintah memutuskan untuk memusatkan para pengungsi Vietnam itu di Pulau Galang. Penampungan Vietnam di Pulau Galang selanjutnya difungsikan juga sebagai *Refugee Processing Centre* yakni tempat dilakukannya proses penentuan status pengungsi oleh UNHCR sebelum akhirnya pengungsi akan direlokasi ke negara-negara tujuan akhir pengungsian, terutama Amerika Serikat, Australia, Perancis, dan Kanada (Ramon, 2019, p. 41).



Gambar 2. *Indonesia Red Cross Hospital Galang Island*
Sumber: Arsip Palang Merah Indonesia, 1980

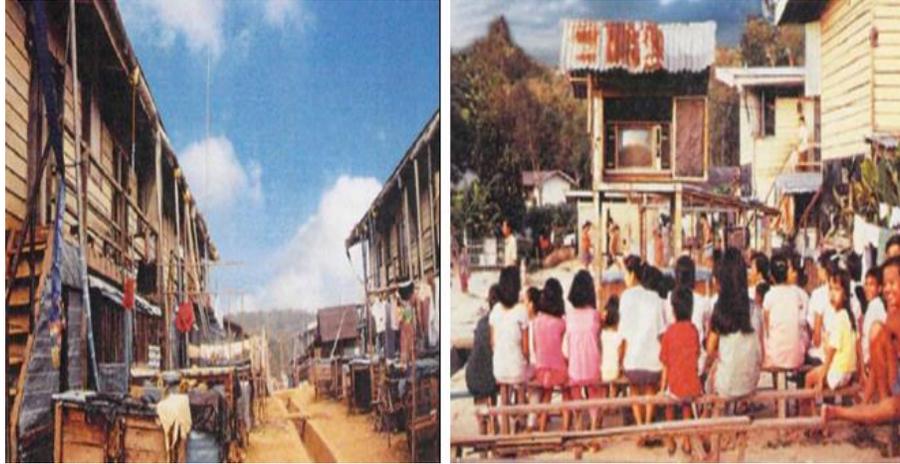
Pemerintah Indonesia semakin serius dalam perannya menangani problem pengungsi Vietnam setelah negara tetangga Singapura menyatakan ketidaksanggupannya pada pertemuan ASEAN pada 15-16 Mei 1979. Adapun pada pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari 24 negara lain, terutama negara-negara tujuan akhir pengungsi atau negara pemberi bantuan beserta dengan UNHCR. Bahkan untuk semakin mengintensifkan pemberian bantuan bagi pengungsi yang berada di Indonesia, UNHCR juga akhirnya membuka kantor perwakilan UNHCR di Indonesia pada tanggal 15 juni 1979 (Ramon, 2019, p. 42).

Proses penampungan pengungsi Vietnam oleh Indonesia ini terus berlangsung hingga pertengahan dekade 1990-an. Dinamika kehidupan orang-orang Vietnam di Pulau Galang pun juga mengalami perubahan. Sempat pada kurun waktu 1984-1985 arus pengungsi Vietnam mengalami penurunan. Akan tetapi, memasuki awal tahun 1989 gelombang pengungsi kembali mengalami peningkatan. Sepanjang proses penampungan, pemrosesan, hingga relokasi pengungsi Vietnam, Pemerintah Indonesia secara sukarela bersedia memberikan bantuan. Bahkan bantuan juga diberikan kepada mereka pencari suaka asal Vietnam. Lembaga Swadaya Masyarakat pun turut membantu kegiatan kemanusiaan ini. Misalnya seperti yang dilakukan oleh *Jesuit Refugee Service* yang turut serta membantu para pengungsi yang berada di Pulau Galang.

Kehidupan Pengungsi Vietnam, 1976-1996

Pulau Galang, tepatnya di Desa Sijantung, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, disitulah orang-orang Vietnam menjalani kehidupannya sebagai pengungsi. Fasilitas, seperti barak pengungsian, tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah, dibangun untuk memfasilitasi mereka. Para pengungsi ini dikonsentrasikan di satu permukiman seluas 80 hektar dan tertutup interaksinya dengan penduduk setempat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan, pengaturan, penjagaan keamanan, sekaligus untuk menghindari penyebaran penyakit (<https://travel.kompas.com/read/2009/03/03/11194614/>). Namun demikian, gelombang pengungsi yang terus meningkat selama satu dekade menyebabkan kondisi mereka terlihat memprihatinkan.

Para pengungsi jelas menjalani kehidupannya dengan monoton. Mereka menjalani kehidupannya di barak-barak sembari menunggu jatah makan berupa ransum. Pergerakan mereka pun sangat terbatas karena statusnya sebagai warga negara asing. Kegiatan seperti belajar bahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan. Bagi yang memiliki sedikit lebih banyak uang, mereka kemudian membuka usaha kecil-kecilan seperti warung kopi atau jasa jahit. Akan tetapi, kriminalitas antar mereka sendiri juga kerap terjadi (Swastiwi, dkk., 2012, p. 47). Meskipun pada awalnya mereka tertutup, lambat laun keberadaan para pengungsi Vietnam ini menimbulkan sebuah interaksi dengan warga setempat. Berbagai permasalahan yang dihadapi para pengungsi pun pada akhirnya berpotensi untuk menyebar ke lingkungan terdekat dari lokasi penampungan (Afriansyah dan Zulfa, 2018, p. 213).



Gambar 3. Kondisi Camp Pengungsian Pulau Galang, 1981
Sumber: Foto Koleksi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kepulauan Riau

Jatah kebutuhan sehari-hari yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berupa beras, makanan kaleng, sayur segar, daging, dan ikan sirkulasinya diatur oleh Pusat Koperasi Angkatan Laut (Puskopal). Namun demikian, anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sebanding dengan populasi pengungsi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1981, terdapat setidaknya 15.095 orang pengungsi yang datang dan bergabung dengan pengungsi sebelumnya. Hingga pertengahan dekade 1990-an, kurang lebih ada 17.168 orang Vietnam dan Kamboja yang terdata pernah mendiami Pulau Galang (Allen dan Long, 1991, p. 91). Pendataan yang akurat memang sulit untuk dilakukan mengingat dalam beberapa kasus, para pengungsi itu ada melarikan diri dari Pulau Galang lewat pantai Melur untuk menuju ke negara lain dalam rangka mencari suaka.

Dalam upaya penanganan pengungsi Vietnam, Pemerintah Indonesia bersama UNHCR kemudian merangkul lembaga-lembaga kemanusiaan lain atau pun perorangan untuk turut serta membantu menyelesaikan problem ini. PMI bersama dengan WHO dan UNICEF kemudian turut terlibat dalam mengontrol penularan penyakit, kekurangan gizi, dan pemberian program pendidikan. Selain itu terdapat organisasi lain seperti Jesuit Refugee Service dan Cap Anamur yang menyediakan obat-obatan dan kapal-kapal untuk menyelamatkan para pengungsi. Adapula perorangan seperti Bernard Kouchner seorang dokter aktivis yang menggerakkan dunia internasional untuk berdonasi membantu para korban perang itu (Swastiwi, dkk., 2012, p. 64-65).

Sebenarnya selain Indonesia, Thailand dan Hongkong juga memberikan responsif positif terhadap penanganan para pengungsi Vietnam. Namun demikian, dunia internasional mengakui bahwa kondisi penanganan manusia perahu di Pulau Galang jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa kamp pengungsi lainnya seperti yang terdapat di Hongkong dan Thailand. Apalagi, di akhir

dekade 1980-an pengungsi Vietnam yang ingin masuk ke Malaysia ditolak karena kebijakan pengalihan jurusan yang diterapkan. Maka, mau tidak mau para pengungsi itu berbondong-bondong mengalihkan tujuannya ke Pulau Galang.



Gambar 4. Fasilitas Kamp Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, 2018
Sumber: Foto Koleksi Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau

Setelah sekian lama pemerintah Indonesia turut andil dalam mengurus para pengungsi Vietnam, pada 1994 muncul kebijakan yang menetapkan alih fungsi Pulau Galang menjadi sebuah kawasan industri. Kebijakan yang muncul ini juga telah disesuaikan dengan kesepakatan Negara-negara ASEAN dan UNHCR bahwa pengelolaan pengungsi Vietnam tersebut hanya sementara. Pengungsi dipulangkan secara bertahap hingga pada akhirnya Kogas (Komando Tugas) kemudian dibentuk untuk mempercepat pemulangan kembali masyarakat pengungsi Vietnam di Pulau Galang, sesuai hasil Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) pada 7 Mei 1996 di Jakarta. Proses pemulangan yang dilakukan oleh Kogas akhirnya dapat diselesaikan pada 19 September 1996. Pada 1997, setelah pemulangan seluruh para pengungsi dan Pulau Galang kosong, diadakan serah terima aset UNHCR yang ada dipulau Galang kepada Mayjen TNI Arie J. Kumaat (Bunari, 2017, p. 35).

Penutup

Pulau Galang kental dengan kisah historis yang lekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Eksodus orang-orang Vietnam karena perang yang berkecamuk di negaranya membawa Indonesia untuk menunjukkan perannya di mata dunia internasional. Presiden Soeharto dengan Komisi Tinggi PBB

untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) sepakat untuk menerima pengungsi dari Vietnam dan dan menempatkannya di Pulau Galang.

Selama pengungsi menempati Pulau Galang, pemerintah Indonesia memberikan kebutuhan bagi pengungsi. Namun demikian, lambat laun problematika pengungsi ini memunculkan dampak baru bagi Indonesia. Banyak dari pengungsi yang kemudian terlibat dalam tindak kriminal dari pencurian hingga pembunuhan. Setelah keadaan Vietnam mulai membaik, Pemerintah Indonesia dan PBB bersepakat untuk mengembalikan mereka ke asalnya.

Sudah tentu dari Pulau Galang, bangsa Indonesia bisa belajar bahwa membantu sesama tidaklah mengenal ras, suku bangsa, atau pun agama. Dari 1979-1997 puluhan ribu orang tinggal dan dirawat di pengungsian. Mereka dibantu sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dari mulai kedatangan hingga kepulangannya ke negara asal.

Referensi

- Afriansyah, Arie dan Zulfa, Eva Achjani. "Refugee Resettlement: A Review of Indonesia Law and Practices", *Jurnal Indonesia Law Review*, Volume 8 Nomor 2, 2018. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Allen, Douglas and Long, Ngo Vinh. *Coming to Term: Indochina, the United States and the War*. United Kingdom: Westview Press, 1991.
- Asmardika, Rahman. "Pulau Galang dan Sejarah Kelam Manusia Perahu Vietnam". <https://news.okezone.com/read/2016/05/13/18/1387149/pulau-galang-dan-sejarah-kelam-manusia-perahu-vietnam>.
- "Bila Pengungsi Vietnam Mengenang Galang", *Tempo*, 1 April 2005.
- Bunari. "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam", *Jurnal Seuneubok Lada*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2017. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Haryanto, Agus. "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume IV Nomor 2, Desember 2014. Purwokerto: Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman.
- Hasibuan, M.S., dkk. 2007. *Prajurit TNI dalam Tugas Kemanusiaan Galang 96*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI.
- Ismayawati, Isye. 2013. *Manusia Perahu: Tragedi Kemanusiaan di Pulau Galang*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Lind, Michael. 2013. *Vietnam: The Necessary War*. New York: Simon and Schuster.
- Namara M.C, dan S. Robert. 1989. *Out of the Cold: New Thinking for American Foreign Policy in the 21th Century*. London: Bloomsbury.
- "Merajut Kisah Pengungsi Vietnam di Pulau Galang". <https://travel.kompas.com/read/2009/03/03/11194614/Merajut.Kisah.Pengungsi.Vietnam.di.Pulau.Galang?page=all>.
- Pradana, Shandy. "Perang Vietnam: Awal Mula, Intervensi Amerika dan Kekalahan Paman Sam". <https://www.idntimes.com/science/discovery/shandy-pradana/perang-vietnam-awal-mula-intervensi-amerika-dan-kekalahan-paman-sam-c1c2-1/2>.
- Prasetyo, Yosep Adi. "Pelajaran dari Pembantaian My Lai". elsam.or.id.
- Ramon, Adrianus A. V. "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional", *Jurnal Teras Law Review*, Volume 1 Nomor 1, November 2019. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Robinson, Court. 1998. *Terms of Refuge: The Indochinese Exodus and the International Response*. London, UK & New York City, USA: Zed Books.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, dkk. 2012. *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Tim Penyusun. 2002. *Laporan Operasi Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau*. Jakarta: Arsip Nasional.